

**PENGADILAN TINGGI AGAMA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2026

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov

Pangkalpinang - Bangka Belitung 33148

Telp. 0717-431929 Fax. 0717-421639

e-mail : ptababel@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemrop

Telp. 0717-431929 Fax. 0717-421639

Pangkalpinang - Bangka Belitung 33148

e-mail : ptababel@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Sekretaris,

The image shows the official circular stamp of the Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. The stamp contains the text 'PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Ujang Solihin

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca.....	8
III. Laporan Operasional	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	14
V. Catatan atas Laporan Keuangan	16
A. Penjelasan Umum	16
A.1. Dasar Hukum.....	16
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung	17
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	20
A.4. Basis Akuntansi	20
A.5. Dasar Pengukuran	21
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	21
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	29
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	29
B.2. Belanja Negara	30
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	34
C.1. Aset Lancar.....	34
C.1.3 Persediaan	36
C.2. Aset Tetap	36
C.2.9 Utang Kepada Pihak Ketiga	41
C.2.12 Ekuitas	42
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	42
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	42
D.2. Beban Pegawai	43

D.3. Beban Persediaan.....	44
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	44
D.5. Beban Pemeliharaan	45
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	46
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	46
D.8. Beban Bantuan Sosial.....	46
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	47
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	47
D.11. Beban Lain-lain	48
D.12. Kegiatan Non Operasional.....	48
D.13. Pos Luar Biasa	49
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	49
E.1. Ekuitas Awal	49
E.2. Surplus (defisit) LO	50
E.3. Transaksi Antar Entitas.....	50
E.4. Diterima/Ditagihkan dari/ke Entitas Lain.....	50
E.5. Ekuitas Akhir	50
F. Pengungkapan Penting Lainnya	51
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	51
F.2. Pengungkapan Lain-lain	51
Laporan-laporan Pendukung.....	55
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	56

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2026	2
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2025	2
Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap.....	27
Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	28
Tabel 5. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2026	30
Tabel 6. Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	30
Tabel 7. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	31
Tabel 8.Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026.....	31
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	32
Tabel 10. Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	32
Tabel 11. Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	33
Tabel 12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026	Error! Bookmark not defined.
Tabel 13. Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	34
Tabel 14. Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	34
Tabel 15. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	35
Tabel 16. Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	35
Tabel 17. Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	36
Tabel 18. Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.....	37
Tabel 19. Rincian Saldo Tanah.....	37
Tabel 20. Rincian Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin	38
Tabel 21. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan.....	38
Tabel 22. Rincian Mutasi Nilai Jaringan.....	39
Tabel 23. Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya.....	39
Tabel 24. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	40
Tabel 25. Rincian Aset Tak Berwujud	40
Tabel 26. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	41
Tabel 27 Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	41
Tabel 28. Rincian Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	42
Tabel 29. Rincian Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	42
Tabel 30. Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Juni 2025	43
Tabel 31. Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	43
Tabel 32. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	44
Tabel 33. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	45
Tabel 34. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	45
Tabel 35. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 36. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 (<i>dalam satuan Rupiah</i>).....	46
Tabel 37. Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	46
Tabel 38. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	47
Tabel 39. Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	48

Tabel 40. Rincian Beban Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	48
Tabel 41. Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	49
Tabel 42. Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	49
Tabel 43. Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2026	50
Tabel 44. Rincian Nilai Perolehan, Rincian Penyusutan pada Aset Tetap 30 Juni 2026.....	57

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

*Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel. Air
Itam, Kec. Bukit Intan Pangkalpinang 33148, Telp. 0717 431929, Fax. 0717 421639
Email : ptababel@gmail.com Website : <http://pta-babel.go.id>*

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Sekretaris,

Ujang Solihin

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2026 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 16.793.670 atau mencapai 51,17 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 32.821.000.

Realisasi Belanja Negara pada per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 12.900.103.993 atau mencapai 54,20 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 23.799.398.000

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026			30 Juni 2025
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	32.821.000	16.793.670	51,17	16.646.406
Belanja Negara	23.799.398.000	12.900.103.993	54,20	6.595.911.829

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 22.210.568.269; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 54.904.797; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 22.155.658.472; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 1.777.516.854; yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 1.777.516.854; dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 20.433.046.415;

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2026	31 Desember 2025	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	54.904.797	4.141.795	50.763.002	1.225,63
Aset Tetap	22.155.658.472	21.791.414.977	364.243.495	1,67
Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset	21.795.556.772	16.178.458.915	5.617.097.857	34.72
Kewajiban				
Utang kepada Pihak Ketiga	1.681.670.213	1.703.743.421	(22.073.208)	(1,30)

Utang Yang Belum Ditagihkan	47.846.641	0	47.846.641	0
Uang Muka dari KPPN	48.000.000	0	48.000.000	0
Jumlah Kewajiban	1.777.516.854	1.703.743.421	73.773.433	4,33
Ekuitas				
Ekuitas Dana	20.433.046.415	20.091.813.351	341.233.064	1,70
Jumlah Ekuitas Dana	20.433.046.415	20.091.813.351	341.233.064	1,70
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	22.210.563.269	21.795.556.772	415.006.497	1,90

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 19.571.967 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 12.561.649.226 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional sebesar Rp. (12.542.077.259), Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp. 0 yaitu berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp. 0 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp. 0 sedangkan Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp. 0 yang berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 0 dan Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 0, jadi jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp. 0, Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa Rp. (12.542.077.259), sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (12.542.077.259).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2026 adalah sebesar Rp. 20.091.813.351 dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar Rp. (12.542.077.259) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 12.883.310.323; sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp. 20.433.046.415.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan

oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2026 nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

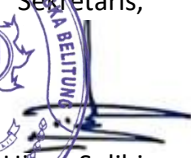
I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Cata	30 Juni 2026			30 Juni 2025
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	32.821.000	16.793.670	51	16.646.406
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah			32.821.000	16.793.670	51	16.646.406
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	20.604.951.000	11.038.115.399	54	5.388.759.856
2.	Belanja Barang	B.2.2.	2.174.447.000	1.231.550.309	57	895.813.675
3.	Belanja Modal	B.2.3.	1.020.000.000	630.438.285	62	311.338.298
Jumlah Belanja Negara			23.799.398.000	12.900.103.993	54	6.595.911.829

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Sekretaris,

Ujang Solihin

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NERACA

PER 30 JUNI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	48.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	1.590.795
Piutang Bukan Pajak	C.1. 3.	2.778.297	0
Persediaan	C.1. 4.	4.126.500	2.551.000
Jumlah Aset Lancar		54.904.797	4.141.795
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	10.796.301.000	10.796.301.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	4.120.947.206	4.100.967.206
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	11.955.927.748	11.955.927.748
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	6.667.109	6.667.109
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2. 6.	610.458.285	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(5.334.642.876)	(5.068.448.086)
Aset Tak Berwujud	C.2. 8.	0	0
Jumlah Aset Tetap		22.155.658.472	21.791.414.977
Jumlah Aset		22.210.583.269	21.795.556.772
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.2		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2 9.	1.681.670.213	1.703.743.421
Uang Yang Belum Ditagihkan	C.2 10.	47.846.641	0
Uang Muka dari KPPN	C.2 11.	48.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.777.516.854	1.703.743.421
Jumlah Kewajiban		1.777.516.854	1.703.743.421

EKUITAS				
Ekuitas	C.2	11	20.433.046.415	20.091.813.351
Jumlah Ekuitas			20.433.046.415	20.091.813.351
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas			22.210.563.269	21.795.556.772

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*


 Pangkalpinang, 30 Juni 2026
 Sekretaris,

 Ujang Solihin



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	19.571.967	19.420.737
Jumlah Pendapatan		19.571.967	19.420.737
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	11.019.690.120	6.048.855.809
Beban Persediaan	D. 3	18.935.500	19.662.500
Beban Barang dan Jasa	D. 4	693.513.604	690.687.158
Beban Pemeliharaan	D. 5	408.125.042	162.570.811
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	155.190.170	56.937.836
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	256.194.790	180.990.050
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		12.561.649.226	7.159.704.164
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(12.542.077.259)	(7.140.283.427)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	60
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	60

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	60
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(12.542.077.259)	(7.140.283.367)
Pos Luar Biasa	D. 13	0
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(12.542.077.259)	(7.140.283.367)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Sekretaris,



Ujang Solihin

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Ekuitas Awal	E. 1	20.091.813.351	15.999.961.116
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(12.542.077.259)	(7.140.283.367)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E. 3	0	0
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Entitas	E. 4	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 6	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 7	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 8	0	0
Lain-lain	E. 9	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 10	12.883.310.323	6.579.265.423
Kenaikan /Penurunan Ekuitas		341.233.064	(561.017.944)
Ekuitas Akhir	E. 11	20.433.046.415	15.438.943.172

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

Visi Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung adalah ***"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang Agung"*** yang bertujuan agar Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dan badan peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara. Hal ini telah dijabarkan dalam nilai-nilai yang dianut oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan moto "PACAK" Profesional, Amanah, Cepat, Akuntabel, dan Komitmen.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- a) Meningkatkan Kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung.
- b) Meningkatkan Pelayanan hukum kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung.
- d) Meningkatkan Kredibilitas dan Akuntabilitas Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan langkah-langkah strategis yang terdokumentasi dengan baik dalam Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2025 s.d 2029. Dokumen Rencana Strategis telah disusun secara sistematis dengan metode SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals*), dan melibatkan seluruh unit kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Perencanaan telah disusun berdasarkan hasil analisis SWOT (*Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman)) yang kemudian menciptakan Kebijakan strategis dan program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung di dalam Dokumen Rencana Strategisnya, telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan jabaran kebijakan masing-masingnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

- (1) Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
- (2) Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
- (3) Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- (4) Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik

dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

- (5) Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama yang dibentuk Ditjen Badilag ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic planning); 3) Fokus Pelanggan (customer focus); 4) Sistem Dokumentasi (document system); 5) Manajemen Sumber Daya (resource management); 6) Manajemen Proses (process management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results).

- (6) Peningkatan Zona Integritas dengan memberlakukan WBK/WBBM

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

- (1) One day publish, yaitu menayangkan putusan secara cepat, dengan mengupload putusan ke web 1 hari setelah diputus sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang one day publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
- (2) Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

Dalam mendukung pencapaian kebijakan tersebut, maka Kontribusi dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas menjadi point penting dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel serta peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan melaksanakan aktivitas kunci berikut:

- (1) Menyusun perencanaan keuangan yang berorientasi pada kebutuhan satuan kerja dan tepat guna.
- (2) Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola Keuangan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Melakukan upaya mitigasi risiko terhadap penyalahgunaan anggaran ataupun bentuk penyalahgunaan lainnya dari eksternal seperti gratifikasi, suap, pungutan liar dan lainnya.

- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yaitu bulanan, triwulan, semester dan tahunan terhadap pelaksanaan anggaran dengan setiap unit kerja.

Melalui peran Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang telah memperoleh Akreditasi Penjaminan Mutu berpredikat A Excellent pada tahun 2019 dan dalam proses pengajuan Penilaian Zona Integritas menuju WBK tahun 2026 ini, diharapkan kualitas Laporan Keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Modul GL dan Pelaporan (SAKTI Modul GLP) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan (SAKTI Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SAKTI Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, yang secara struktural berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan

Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Semester 1	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah. Aset lain-lain disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi Penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) **Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali**

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2016.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp.16.793.670*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 16.793.670 atau mencapai 51,17% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 32.821.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2026

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	32.821.000	16.793.670	51,17
Total Pendapatan		32.821.000	16.793.670	51,17

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 147.264 atau 0,88 persen dibandingkan 30 Juni 2025. Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan karena bertambahnya jumlah Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2026. Perbandingan Hakim Tinggi dan atau pegawai yang menempati rumah dinas, realisasi PNBP per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Perbandingan realisasi PNBP 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6. Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	16.793.670	16.646.406	147.264	0.88
Total Pendapatan		16.793.670	16.646.406	147.264	0.88

B.2. Belanja Negara

Realisasi
Belanja Negara
: Rp.
12.900.398.000

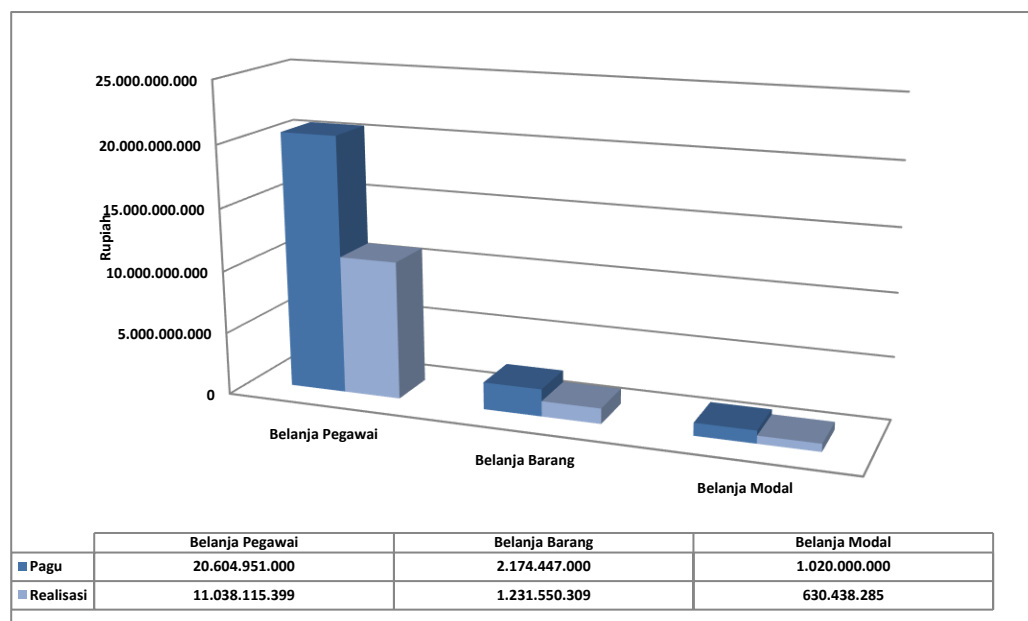
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 12.900.103.993 sebesar 54,20 persen dari anggaran senilai Rp. 23.799.398.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 Juni 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	20.604.951.000	11.038.115.399	53,57
Belanja Barang	2.174.447.000	1.231.550.309	56,64
Belanja Modal	1.020.000.000	630.438.285	61,81
Total Belanja Bruto	23.799.398.000	12.900.103.993	54,20
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	23.799.398.000	12.900.103.993	54,20

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul GLP per 30 Juni 2026

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.304.192.104 atau sebesar 95,57 persen dari realisasi tahun lalu pada periode 30 Juni 2025. Kenaikan tersebut disebabkan oleh bertambahnya Pagu Belanja Pegawai terutama Belanja Tunjangan Pph Pejabat Negara dan Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara karena kenaikan tunjangan Hakim Tinggi, Belanja Barang dan Belanja Modal untuk Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan sudah dilaksanakan di Semester I 2026.

Perbandingan realisasi belanja per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	11.038.115.399	5.388.759.856	5.649.355.543	104,83
Belanja Barang	1.231.550.309	895.813.675	335.736.634	37,47
Belanja Modal	630.438.285	311.338.298	319.099.987	102,49
Total Belanja	23.799.398.000	12.900.103.993	10.899.294.007	84,48

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.
11.038.115.399*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 11.038.115.399 dan 5.388.759.856.

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.649.355.543 atau 104,83 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2025. Hal ini disebabkan adanya kenaikan tunjangan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.208.248.300	1.086.014.800	122.233.500	11,25
Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.366	13.734	2.632	19,16
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	74.410.814	61.023.010	13.387.804	21,93
Belanja Tunj. Anak PNS	17.397.528	14.616.070	2.781.458	19,03
Belanja Tunj. Struktural PNS	53.640.000	54.180.000	(540.000)	0,99
Belanja Tunj. Fungsional PNS	73.040.000	59.980.000	13.060.000	21,77
Belanja Tunj. PPh PNS	20.829.555	17.132.802	3.696.753	21,57
Belanja Tunj. Beras PNS	44.972.820	37.006.620	7.966.200	21,52
Belanja Uang Makan PNS	104.287.000	95.236.000	9.051.000	9,50
Belanja Tunjangan Umum PNS	11.800.000	8.135.000	3.665.000	45,05
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	56.700.000	63.450.000	(6.750.000)	(10,63)
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	2.024.946.764	777.044.489	1.247.902.275	160,59
Belanja Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	7.084.500.000	3.037.200.000	4.407.300.000	133,25
Belanja Gaji Pokok PPPK	185.346.750	51.257.600	134.089.150	261,59

Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.035	778	3.257	418,63
Belanja Tunjangan Suami/Isteri PPPK	14.892.998	5.125.760	9.767.238	190,55
Belanja Tunjangan Anak PPPK	4.500.529	2.050.304	2.450.225	119,50
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8.480.000	8.480.000	0	0
Belanja Tunjangan Beras PPPK	14.085.000	4.634.880	9.450.120	203,89
Belanja Tunjangan Umum PPPK	28.195.000	0	28.195.000	0
Belanja Uang Makan PPPK	9.171.250	6.364.000	2.807.250	44,11
Total Belanja Brutto	11.039.465.407	5.388.945.847	5.650.519.560	104,85
Pengembalian Belanja	1.350.008	185.991	1.164.017	625,84
Total Belanja Netto	11.038.115.399	5.388.759.856	5.649.355.543	104,83

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang
: Rp.
1.231.550.309*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar dan Rp. 1.231.550.309 dan Rp 895.813.675

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 335.736.634 atau 37,47 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025. Hal ini disebabkan bertambahnya pagu anggaran Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun)	%
Belanja Barang Operasional	305.789.737	322.772.328	(16.982.591)	5,26
Belanja Barang Non Operasional	1.740.000	700.000	1.040.000	148,57
Belanja Barang Persediaan	25.754.700	21.607.000	4.147.700	19,19
Belanja Jasa	383.182.764	336.279.200	46.903.564	13,94
Belanja Pemeliharaan	383.558.342	157.517.311	226.041.031	143,50
Belanja Perjalanan Dinas	131.524.766	56.937.836	74.586.930	130,99
Total Belanja Bruto	1.231.550.309	895.813.675	335.736.634	37,47
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1.231.550.309	895.813.675	335.736.634	37,47

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal :
Rp.
630.438.285

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 630.438.285 dan Rp. 311.338.298

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 319.099.987 atau 102,49 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2026. Hal ini disebabkan adanya pagu belanja modal, baik belanja modal peralatan mesin maupun belanja modal Gedung dan bangunan.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 12. Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	19.980.000	107.650.000	107,650,000	100,00
Belanja Modal Gedung & Bangunan	610.458.285	203.688.108	406.770.177	199,70
Total Belanja Brutto	630.438.285	311.338.298	319.099.987	102,49
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	630.438.285	311.338.298	319.099.987	102,49

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp.
54.904.797

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 54.904.797 dan Rp. 4.141.795

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 13. Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Kas di Bendahara Pengeluaran	48.000.000	0

Belanja Dibayar Dimuka	0	1.590.795
Piutang Bukan Pajak	2.778.297	0
Persediaan	4.126.500	2.551.000
Total Aset Lancar	54.904.797	4.141.795

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran: Rp
48.000.000 -.*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 48.000.000. dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 14. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2026	31 Desember 2025
1	Tunai	48.000.000	0
2	Bank	0	0
3	Kwitansi UP	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak:
Rp.2.778.297.*

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.778.297 dan Rp. 0. Piutang Bukan Pajak merupakan piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan yang berasal dari sewa rumah dinas Hakim yang dipotong melalui SPM gaji tiap bulan.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
1	Piutang Bukan Pajak	2.778.297	0
	Total	2.778.297	0

C.1.3 Persediaan

Persediaan: Rp.
4.126.500.

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.126.500 dan Rp. 2.551.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplier) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
1	Barang Konsumsi	2.947.000	1.052.000
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	1.179.500	1.499.000
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		4.126.500	2.551.000

Semua persediaan sampai dengan tanggal akhir pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Nomor : 112/KPB.PTA.W28-A/PL1.2.5/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp.
22.155.658.472

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 tersaji sebesar Rp. 22.155.658.472 dan Rp. 21.791.414.977. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025	Perubahan	
				Rp	%
1	Tanah	10.796.301.000	10.796.301.000	0	0
2	Peralatan dan Mesin	4.120.947.206	4.100.967.206	19.980.000	0,49
3	Gedung dan Bangunan	11.955.927.748	11.955.927.748	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	6.667.109	6.667.109	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	610.458.285	0	610.458.285	0
	Jumlah	22.155.658.472	21.791.414.977	364.243.495	1,67
	Akumulasi Penyusutan	(5.334.642.876)	(5.068.448.086)	(266.194.790)	5,25
	Nilai Buku Aset Tetap	22.210.563.269	21.795.556.772	415.006.497	1,90

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp.
10.796.301.000.

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.796.301.000 dan Rp. 10.796.301.000.

Rincian saldo tanah per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Rincian Saldo Tanah

(dalam satuan Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	10.796.301.000
Mutasi Tambah:	
Pembelian	0
Hibah	0
Reklasifikasi	0
Mutasi Kurang:	
Revaluasi aset	0
Penghapusan	0
Saldo per 30 Juni 2026	10.796.301.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku per 30 Juni 2026	10.796.301.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp.
4.120.947.206

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.120.947.206 dan Rp. 4.100.967.206 Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 19. Rincian Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 01 Januari 2026	4.100.967.206
Mutasi Tambah:	19.980.000
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2026	4.120.947.206
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(3.830.737.220)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	290.209.986

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan : Rp.
11.955.927.748

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 11.955.927.748 dan Rp. 11.955.927.748.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 01 Januari 2026	11.955.927.748
Mutasi Tambah:	0
Bangunan Gedung	0
Mutasi Kurang:	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 30 Juni 2026	11.955.927.748
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(1.503.905.656)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	10.452.022.092

C.2.4. Jaringan

Aset Jalan, Irigasi,
dan Jaringan : Rp.
0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jaringan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 21. Rincian Mutasi Nilai Jaringan
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 01 Januari 2026	0
Mutasi Tambah	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	0
Mutasi Kurang	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku per 30 Juni 2026	0

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya:
Rp 6.667.109.

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.667.109 dan Rp. 6.667.109.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 22. Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 01 Januari 2026	6.667.109
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2026	6.667.109
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku per 30 Juni 2026	6.667.109

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp. 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 610.458.285 dan Rp. 0

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
(5.334.642.876).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing Rp. (5.334.642.876) dan Rp. (5.068.448.086).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Tabel 23. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	10.796.301.000	0	10.796.301.000
2	Peralatan dan Mesin	4.120.947.206	(3.830.737.220)	290.209.986
3	Gedung dan Bangunan	11.955.927.748	(1.503.905.666)	10.452.022.092
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	6.667.109	0	6.667.109
	Jumlah	26.879.843.063	(5.334.642.876)	21.545.200.187

C.2.8 Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud :
Rp 0.

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Aset Tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Aset Tak Berwujud	0
2.	Software	0
3.	ATB lainnya	0
4.	Aset lain-lain	0
	Jumlah Total	0

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2026.

C.2.9 Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga :
Rp 1.681.670.213*

Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.681.670.213 dan Rp. 1.703.743.421. Utang Kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima.

Utang Kepada Pihak Ketiga pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 25. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Utang Kepada Pihak Ketiga	1.681.670.213	1.703.743.421
Jumlah	1.681.670.213	1.703.743.421

C.2.10 Utang Yang Belum Ditagihkan

*Utang Yang Belum
Ditagihkan:
Rp 47.846.641.*

Jumlah Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 47.846.641 dan Rp. 0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
1.	Utang Yang Belum Ditagihkan	47.846.641	0
Jumlah Total		47.846.641	0

C.2.11 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN:
Rp. 48.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 48.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Tabel 27. Rincian Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Uang Muka dari KPPN	48.000.000	0
Jumlah	48.000.000	0

C.2.12 Ekuitas

Ekuitas:
Rp. 20.289.662.073

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.433.046.415 dan Rp 20.091.813.351. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Tabel 28. Rincian Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Ekuitas	20.433.046.415	20.091.813.351
Jumlah	20.433.046.415	20.091.813.351

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBPN :
Rp. 35.524.056.

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 35.524.056 dan Rp. 30.419.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 29.

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.571.967	19.420.737	0,77
	Total Pendapatan	35.524.056	19.420.737	0,77

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 11.038.115.399 dan Rp. 5.388.759.856. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 30. Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.208.248.300	1.086.014.800	122.233.500	11,25
Belanja Pambulan Gaji PNS	16.366	13.734	2.632	19,16
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	74.410.814	61.023.010	13.387.804	21,93
Belanja Tunj. Anak PNS	17.397.528	14.616.070	2.781.458	19,03
Belanja Tunj. Struktural PNS	53.640.000	54.180.000	(540.000)	0,99
Belanja Tunj. Fungsional PNS	73.040.000	59.980.000	13.060.000	21,77
Belanja Tunj. PPH PNS	20.829.555	17.132.802	3.696.753	21,57
Belanja Tunj. Beras PNS	44.972.820	37.006.620	7.966.200	21,52
Belanja Uang Makan PNS	104.287.000	95.236.000	9.051.000	9,50
Belanja Tunjangan Umum PNS	11.800.000	8.135.000	3.665.000	45,05
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	56.700.000	63.450.000	(6.750.000)	(10,63)
Belanja Tunj. PPH Pejabat Negara	2.024.946.764	777.044.489	1.247.902.275	160,59
Belanja Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	7.084.500.000	3.037.200.000	4.407.300.000	133,25
Belanja Gaji Pokok PPPK	185.346.750	51.257.600	134.089.150	261,59
Belanja Pambulan Gaji PPPK	4.035	778	3.257	418,63
Belanja Tunjangan Suami/Isteri PPPK	14.892.998	5.125.760	9.767.238	190,55
Belanja Tunjangan Anak PPPK	4.500.529	2.050.304	2.450.225	119,50

Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8.480.000	8.480.000	0	0
Belanja Tunjangan Beras PPPK	14.085.000	4.634.880	9.450.120	203,89
Belanja Tunjangan Umum PPPK	28.195.000	0	28.195.000	0
Belanja Uang Makan PPPK	9.171.250	6.364.000	2.807.250	44,11
Total Belanja Brutto	11.039.465.407	5.388.945.847	5.650.519.560	104,85
Pengembalian Belanja	1.350.008	185.991	1.164.017	625,84
Total Belanja Netto	11.038.115.399	5.388.759.856	5.649.355.543	104,83

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 18.935.500 dan Rp. 19.662.500 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan konsumsi	18.935.500	19.662.500	727.000	3,69
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan				
Total Beban Persediaan	18.935.500	19.662.500	727.000	3,69

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp. 693.513.604. Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 693.513.604 dan Rp. 690.687.158 Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	276.714.106	322.173.124	(45.459.018)	(14,11)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	642.996	401.367	241.629	60,20
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	30.700.000	30.700.000	0	0
Beban Barang Operasional Lainnya	3.315.000	0	3.315.000	0
Beban Langganan Listrik	42.512.960	0	42.512.960	0
Beban Langganan Telepon	666.000	666.000	0	0
Beban Sewa	336.022.542	336.046.667	(58.842.458)	(14,90)
Beban Jasa Lainnya	1.200.000	0	1.200.000	0
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0	0
Total Beban Barang dan Jasa	691.773.604	690.987.158	786.446	(0,11)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan: Rp.
408.125.042

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.408.125.042 dan Rp.162.570.811. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	161.037.080	66.324.800	94.712.280	142,80
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	121.999.000	28.696.000	93.303.000	325,14
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114.108.262	63.696.511	50.411.751	79,14
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	10.980.700	3.853.500	7.127.200	184,95
Total Beban Pemeliharaan	408.125.042	162.570.811	245.554.231	151,04

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat : Rp.
0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp. 0.*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 266.194.790

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 266.194.790 dan Rp. 180.990.500. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	97.964.181	107.999.181	(10.035.000)	(9,29)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	168.230.609	72.990.869	95.239.750	130,48
Beban Penyusutan Jaringan	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	266.194.790	180.990.500	85.204.290	47,07

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Rincian Beban Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakompetabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp.0 Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa
: Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp.
20.091.813.351

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 dan 1 Januari 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.091.813.351 dan Rp. 15.999.961.116.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. (12.542.077.259) dan Rp. (7.140.283.367). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas: Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 12.883.310.323 dan Rp 6.579.265.423 Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BU. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Tabel 41. Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan Ke Entitas Lain	0
Diterima Dari Entitas Lain	0
Jumlah	0

E.4. Diterima/Ditagihkan dari/ke Entitas Lain

Diterima/Ditagihkan dari/ke Entitas Lain Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026, Ditagihkan Ke Entitas Lainnya sebesar 0 sedangkan Diterima Dari Entitas Lainnya sebesar Rp. 0

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp20.433.046.415 dan Rp. 15.438.943.172

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN

Penyusunan belanja Pemerintah Pusat yang dirinci menurut fungsi dilakukan untuk melakukan analisis yaitu mengetahui fungsi-fungsi mana yang menyerap alokasi anggaran paling banyak maupun yang menyerap alokasi anggaran paling sedikit. Dalam penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam 11 fungsi sebagai berikut : (1) Pelayanan Umum, (2) Pertahanan, (3) Ketertiban dan Keamanan, (4) Ekonomi, (5) Lingkungan Hidup, (6) Perumahan dan Fasilitas Umum, (7) Kesehatan, (8) Pariwisata dan Budaya, (9) Agama, (10) Pendidikan dan (11) Perlindungan Sosial. Selanjutnya fungsi-fungsi dirinci ke dalam Subfungsi, Program dan Kegiatan. Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2026 pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung antara lain sebagai berikut :

Tabel 38 Laporan Kinerja Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2026

Kode	Nama Satker	Kegiatan	Belanja				Keluaran			
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	Ket
EBB951	Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung	Layanan Sarana Internal	20.000.000	19.980.000	100	4		Unit	100,00	
EBB971	Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung	Layanan Prasarana Internal	1.000.000.000	610.458.285	61	1		Unit	61,05	
EBA962	Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung	Layanan Umum	1.440.000	1.440.000	100	1		Laporan	100,00	
EBA994	Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung	Layanan Perkantoran	22.777.658.000	12.267.925.716	54	2		Layanan	53,86	

EBD953	Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100,00	1		Dokumen	100,00	
--------	---	---------------------------------------	---------	---------	--------	---	--	---------	--------	--

F.2.2. Pengungkapan Program Prioritas Nasional (PN)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Perpres RI Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2023, pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN).

F.2.3. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK baik pada semester maupun tahun anggaran yang lalu. Rencana tindak lanjut dan monitoring penyelesaian temuan BPK ini terdapat dalam lampiran pendukung laporan keuangan ini.

F.2.4. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Terdapat informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua per 30 Juni 2026 sebesar Rp 12.918.247.571 berupa langganan telepon, langganan Listrik, Tunjangan Pejabat Negara, dan Tunjangan PPh Pejabat Negara di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. (dapat dilihat pada lampiran).

F.2.5. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung adalah:

Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang Jenis Rekening Virtual Account dengan nomor rekening 65324440728 a.n. BPG 015 PENGADILAN TINGGI AGAMA BABEL 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA Badan Urusan Administrasi MA RI (01) dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2026 sebesar Rp. 0

F.2.6. Revisi DIPA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2026 telah melakukan beberapa kali revisi DIPA maupun revisi POK. Revisi ini dilakukan disebabkan antara lain karena adanya beberapa akun yang mengalami kelebihan anggaran dan beberapa akun yang mengalami kekurangan anggaran sehingga bila tidak direvisi maka anggaran yang ada tidak dapat terserap dengan sempurna.

Adapun Rinciannya sebagai berikut :

1. Revisi II tentang revisi POK
2. Revisi III tentang revisi POK
3. Revisi IV tanggal 6 Februari 2026 tentang revisi Hal III Dipa
4. Revisi V tentang revisi POK
5. Revisi VI tanggal 9 April 2026 tentang revisi ABT Belanja Pegawai
6. Revisi VII tentang revisi POK
7. Revisi VIII tanggal 6 Mei 2026 tentang revisi Hal III dan POK
8. Revisi IX tentang revisi POK
9. Revisi X tanggal 17 Juni 2026 tentang revisi ABT

F.2.7. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak Terdapat Ralat SPM, SSBP dan SSPB per 30 Juni 2026 pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Agama Bangka Belitung.

F.2.8. Catatan Penting Lainnya

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah menunjuk pejabat pengelola keuangan untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sesuai dengan Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI No. 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 01 Desember 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2025, SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor 125/SEK.PTA.W28-A/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Permintaan Pembayaran (PPSPP) Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dan Staf Pengelola Keuangan Satker 440728 Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026, SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor 154/SEK.PTA.W28-A/SK.KU1.1.1/XII/2024 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satker 440728 Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 dan SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor

7/KPTA.W28-A/SK.HK1.2.5/I/2026 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Dipa Satker 440728 Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.

Dengan nama pejabat sebagai berikut :

- a) Kuasa Pengguna Anggaran : Ujang Solihin, S.Ag., M.H., M.M.
- b) Pejabat Pembuat Komitmen : Eko Febrianto, S.H.
- c) Pejabat Penguji SPP dan Pejabat Pembuat SPM : Yulia, S. Kom.
- d) Bendahara Pengeluaran : Jamiliyah, S.E.
- e) Bendahara Penerimaan : Nifa Novalin, S.S.T

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Tabel 42. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk
Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2026

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A. Tanah				
1.	Tanah	10.796.301.000	0	10.796.301.000
B. Peralatan dan Mesin				
1.	3.01.03 Alat Bantu	306.280.000	(241.827.144)	64.452.856
2.	3.02.01 Alat Angkutan Darat Bermotor	928.403.912	(928.403.912)	0
3.	3.03.01 Alat Bengkel Bermesin	0	0	0
4.	3.05.01 Alat Kantor	481.939.426	(462.154.626)	19.784.800
5.	3.05.02 Alat Rumah Tangga	1.256.105.018	(1.079.958.688)	176.146.330
6.	3.06.01 Alat Studio	130.561.000	(125.170.000)	5.391.000
7.	3.06.02 Alat Komunikasi	46.689.250	(46.689.250)	0
8.	3.06.03 Peralatan Pemancar	0	0	0
9.	3.10.01 Komputer Unit	702.730.668	(688.008.168)	14.722.500
10.	3.10.02 Peralatan Komputer	268.237.932	(258.525.432)	9.172.500
C. Gedung dan Bangunan				
1.	4.01.01 Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.960.227.748	(834.761.153)	8.125.466.595
2.	4.01.02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.995.700.000	(669.144.503)	2.326.555.497
D. Jalan, Jembatan Irigasi dan Jaringan				
1.	5.04.02 Jaringan Listrik	0	0	0
E. Aset Tetap Lainnya				
6.	6.01.01 Bahan Perpustakaan Tercetak	2.967.109	0	2.967.109
6.	6.01.02 Kartografi, Naskah dan Lukisan	3.700.000	0	3.700.000
Total		26.879.843.063	(5.334.642.790)	21.545.200.187

B. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;



- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemetakhiran Data Barang Milik Negara;
- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul



Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.



LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2026, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu



Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:



1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, dalam LBKP Tahun 2026 Semester 1 ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah



Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2026 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 415/BUA.4/PL1.2.7/VII/2026. Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan



Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebesar Rp26.917.657.063,00 (*Dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp26,896,237,063,00 (*Dua puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2026 sebesar Rp21,420,000,00 (*Dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp21,420,000,00 (*Dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu*) dan mutasi kurang sebesar Rp0 (*Nol rupiah.*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2026.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

(paragraf berikut ini hanya untuk narasi Laporan Barang Pengguna Wilayah/LBPW)

Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBPW) Bangka Belitung periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan himpunan dari LBKP pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Kuasa Pengguna Barang. (untuk LBP-W)

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 30 Juni 2026
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2026
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);



7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2026 menurut Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp26,896,237,063 (Dua puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp26,879,843,063 (*Dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp37,814,000,00 (*Tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp4.126.500,00 (*Empat juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus*



rupiah). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	1.052.000	1.895.000	2,947,000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1.499.000	319.500	1,179,500

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0 (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp0 (*nol rupiah*)

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp10.796.301.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 11,230 m² dengan nilai sebesar Rp10.796.301.000,00 (*Sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus satu ribu rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp6.089.258.000,00 (*Enam miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp6.089.258.000,00 (*Enam miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah



Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*) sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	11.230	10.796.301.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 4. Kondisi Tanah

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 771 buah dengan nilai sebesar Rp4,158,761,206,00 (*Empat miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 746 buah dengan nilai sebesar Rp4,137,341,206,00 (*Empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam*), mutasi tambah sebanyak 10 buah dengan nilai sebesar Rp160.430.190,00 (*Seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah.*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (*0 rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Bantu (3.01.03)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp306.280.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 341 buah dengan nilai sebesar Rp306.280.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
------------------------	----------------	-----------------



	(Rp)	(Rp)
-	-	-

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Besar

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Besar

Dari jumlah Alat besar di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Besar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2	306.280.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 7. Kondisi Alat Besar

b. Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 16 buah dengan nilai sebesar Rp928.403.912,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Alat Besar



Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Alat Besar

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Angkutan Darat Bermotor berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	16	928.403.912
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 10. Kondisi Alat Angkutan Darat Bermotor

Kelompok barang Alat Angkutan Darat Bermotor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

c. Alat Bengkel Bermesin (3.03.01)

Saldo Alat Bengkel Bermesin pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Bengkel Bermesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Alat Bengkel Bermesin



Mutasi Kurang Alat Bengkel Bermesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Alat Bengkel Bermesin

Dari jumlah Alat Bengkel Bermesin di atas, Saldo Alat Bengkel Bermesin yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Bengkel Bermesin berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 13. Kondisi Alat Bengkel Bermesin

Kelompok barang Alat Bengkel Bermesin yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

d. Alat Kantor(3.05.01)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp482.449.426,00 (*Empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp482.449.426,00 (*Empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-



Tabel 14. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor

Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 15. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor

Dari jumlah Alat Kantor di atas, Saldo Alat Kantor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Kantor berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	125	482.449.426
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 16. Kondisi Alat Kantor

Kelompok barang Alat Kantor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

e. Alat Rumah Tangga (3.05.02)

Saldo Alat Rumah Tangga pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.270.889.018 (*Satu miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.143.038.828 (*Satu miliar seratus empat puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp127.850.190 (*Seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	127.850.190	-



Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Alat Rumah Tangga

Dari jumlah Alat Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	500	1.270.889.018
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 19. Kondisi Alat Rumah Tangga

Kelompok barang Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

f. Alat Studio (3.06.01)

Saldo Alat Studio pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp130.561.000 (*Satu miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp130.561.000 (*Satu miliar seratus empat puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah.*), mutasi tambah sebesar Rp0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
------------------------	------------------------	-------------------------



-	-	-
---	---	---

Tabel 20. Rincian Mutasi Tambah Alat Studio

Mutasi Kurang Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 21. Rincian Mutasi Kurang Alat Studio

Dari jumlah Alat Studio di atas, Saldo Alat Studio yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Studio berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	14	130.561.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 22. Kondisi Alat Studio

Kelompok barang Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

g. Alat Komunikasi (3.06.02)

Saldo Alat Komunikasi pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp47.039.250 (*Empat puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp47.039.250 (*Empat puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-



Tabel 23. Rincian Mutasi Tambah Alat Komunikasi

Mutasi Kurang Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 24. Rincian Mutasi Kurang Alat Komunikasi

Dari jumlah Alat Komunikasi di atas, Saldo Alat Komunikasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Komunikasi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	20	47.039.250
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 25. Kondisi Alat Komunikasi

Kelompok barang Alat Komunikasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

h. Komputer Unit (3.10.01)

Saldo Alat Komputer Unit pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp702.730.668 (*Tujuh ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp683.100.668 (*Enam ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp19.630.000 (*Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Mutasi Tambah Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transaksi Masuk	19.630.000	-



Tabel 26. Rincian Mutasi Tambah Komputer Unit

Mutasi Kurang Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 27. Rincian Mutasi Kurang Komputer Unit

Dari jumlah Komputer Unit di atas, Saldo Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Komputer Unit berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	49	702.730.668
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 28. Kondisi Komputer Unit

Kelompok barang Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

i. Peralatan Komputer (3.10.02)

Saldo Peralatan Komputer pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp270.427.932 (*Dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp268.987.932 (*Dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 1.440.000 (*Satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transaksi Masuk	-	1.440.000



Tabel 29. Rincian Mutasi Tambah Komputer Unit

Mutasi Kurang Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 30. Rincian Mutasi Kurang Komputer Unit

Dari jumlah Komputer Unit di atas, Saldo Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Komputer Unit berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	37	270.427.932
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 31. Kondisi Komputer Unit

Kelompok barang Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp3.830.737.220,00 (*Tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp368.194.167,00 dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp4.934.000,00.

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2026



adalah sebesar Rp 11.955.927.748 (*Sebelas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 5.860.584.400,00 (*Lima miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah*), dan mutasi tambah sebesar Rp 8.921.850.486 (*Delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 2.826.507.138 (*Dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung Tempat Kerja (4.01.01)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp8.960.227.748,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp2.864.884.400,00, mutasi tambah sebanyak 5 buah dengan nilai sebesar Rp8.921.850.486,00 dan mutasi kurang sebanyak 5 buah dengan nilai sebesar Rp2.826.507.138,00.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	8.921.850.486,00	-

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Kerja

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	2.826.507.138,00	...

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Kerja

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Bangunan Gedung Tempat Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai



sebesar Rp0.

Rincian data Bangunan Gedung Tempat Kerja berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2	8.921.850.486,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 10. Kondisi Bangunan Gedung Tempat Kerja

b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal (4.01.02)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 17 buah dengan nilai sebesar Rp2.995.700.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 17 buah dengan nilai sebesar Rp2.995.700.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	...

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Tinggal di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Bangunan Gedung Tempat Tinggal yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai



sebesar Rp0.

Rincian data Bangunan Gedung Tempat Tinggal berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	17	2.995.700.000,00
Rusak Ringan	...	...
Rusak Berat	...	...

Tabel 10. Kondisi Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp11.955.927.748,00 (*Sebelas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp1.335.675.047,00 dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah Jalan dan Jembatan, 0 buah Irigasi, serta 0 buah Jaringan dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan adalah sebagai berikut:
Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
------------------------	----------------	-----------------



	(Rp)	(Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp0,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp6.667.109 (*Enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp6.667.109 (*Enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan Tercetak (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah



sebesar Rp. 2.967.109 (dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 2.967.109 (dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 13. Rincian Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 14. Rincian Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

b. Kartografi, Naskah dan Lukisan (6.01.03)

Saldo Kartografi, Naskah dan Lukisan pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Kartografi, Naskah dan Lukisan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-



Tabel 13. Rincian Mutasi Kartografi, Naskah dan Lukisan

Mutasi Kurang Kartografi, Naskah dan Lukisan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 14. Rincian Mutasi Kartografi, Naskah dan Lukisan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp6.667.109 (*Enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp0,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
------------------------	----------------	-----------------



	(Rp)	(Rp)
-	-	-

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

8. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per kelompok barang adalah sebagai berikut:

1) Software

Saldo Software pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya



Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	0	0
2. Peralatan dan Mesin	0	0
3. Gedung dan Bangunan	0	0
4. Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan	0	0
5. Aset Tetap Lainnya ..dst	0	0
Jumlah	0	0

Tabel 23. BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya per 30 Juni 2026

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun Aset Tetap Yang



Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 30 Juni 2026 yang sebelumnya senilai Rp0,00 (nol rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

d. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

9. Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit. atau Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah.

V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 30 Juni 2026

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp26,917,657,063,00 (*dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	4.126.500	0	0	0	4.126.500	0
	Sub Jumlah (1)	4.126.500	0	0	0	4.126.500	0



II	Aset Tetap						
1	Tanah	10.796.301.000	0	0	0	10.796.301.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4.100.967.206	0	36.374.000	0	4.158.761.206	0
3	Gedung dan Bangunan	11.955.927.748	0	0	0	11.955.927.748	0
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	6.667.109	0	0	0	6.667.109	0
6	KDP	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (2)		26,879,843,063	0	36.374.000	0	26,917,657,063	0
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (3)		0	0	0	0	0	0
Total		26,879,843,063	0	36.374.000	0	26,917,657,063	0

Tabel 26. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	-	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (1)		-	0	0	0	0	0
II	Aset Tetap						
1	Tanah	10.796.301.000	40	0	0	10.796.301.000	40
2	Peralatan dan Mesin	4.100.967.206	15	36.374.000	100	4.137.341.206	15
3	Gedung dan Bangunan	11.955.927.748	44,8	-	0	11.955.927.748	44,8
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0	-	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	6.667.109	0,2	0	0	6.667.109	0,2
6	KDP	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (2)		26.859.863.063	100	36.374.000	100	26.896.237.063	100
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	-	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0



3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (3)		0	0	0	0	0	0
Total		26.859.863.063	100	36.374.000	100	26.896.237.063	100

Tabel 26. Nilai Akumulasi Penyusunan BMN Per Akun Neraca

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No .	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar	4.126.500	4.126.500	0
1	Persediaan	4.126.500	4.126.500	0
II	Aset Tetap	21.791.414.977	21.791.414.977	0
1	Tanah	10.796.301.000	10.796.301.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4,120,947,206	4.100.967.206	0
3	Gedung dan Bangunan	11.955.927.748	11.955.927.748	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	6.667.109	6.667.109	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	610.458.285	610.458.285	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5,334,642,876)	(5,334,642,876)	0
III	Aset Lainnya	0	0	0
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain *)	0	0	0
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		22,159,784,972	22,159,784,972	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 27. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat



selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 3 (tiga) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan 2023	20.640.463.525	-	-
2	Laporan 2024	20.640.463.525	1.153.502.452	5,59%
3	Laporan 2025	21.793.965.977	1.153.502.452	5,59%

Tabel 27. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung per Periode Laporan

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	-	-	5	10.796.301.000
2	Alat Angkutan Bermotor	-	-	16	928.403.912
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	-	-	667	1.950.918.694
4	Peralatan dan Mesin TIK	-	-	86	973.158.600
5	Alat Berat	-	-	2	306.280.000
6	Bangunan Gedung	-	-	2	8.960.227.748
7	Rumah Negara	-	-	17	2.995.700.000
8	Jalan dan Jembatan	-	-	0	0
9	Instalasi dan Jaringan	-	-	0	0
10	Bangunan Air dan Irigasi	-	-	0	0



11	Aset Tetap lainnya	-	-	38	6.667.109
12	Aset Tak Berwujud	-	-	0	0
JUMLAH		-	-	833	26.917.657.063

Tabel 28. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung selama periode Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:



No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah- tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. dikembalikan	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 29. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026



c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 30. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0 (*nol rupiah*) sebagaimana rincian pada Daftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

2. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0 (*nol rupiah*) sebagaimana rincian pada Daftar Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Tidak ada permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026.

f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Tidak ada langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN Semester I tahun 2026. Terhadap aset berwujud yang dihentikan penggunaannya, perlu dilakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan aset tak berwujud tersebut betul-betul tidak digunakan dan segera diusulkan penghapusannya.



g. Pengungkapan Penting Lainnya

Tidak ada pengungkapan penting lainnya yang perlu disampaikan.

h. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak ada perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan.

C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung terkait **(Aset Tetap/Persediaan/dll)** dengan rincian temuan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Temuan BPK atas LKKL

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	-	-

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKKL 2025 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

2. Temuan BPK atas LKPP

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	-	-

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKPP 2025 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2026.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2026 Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2028 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telaah
1	Pemeliharaan	Bangunan gedung kantor	Pengajuan
2	Pemeliharaan	Bangunan rumah negara	Pengajuan
3	Pemeliharaan	Kendaraan dinas roda 4	Pengajuan
4	Pemeliharaan	Kendaraan dinas roda 2	Pengajuan
5	Pemeliharaan	Peralatan dan mesin TIK dan Non TIK	Pengajuan



Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 0 usulan dan tidak disetujui sebanyak 0 usulan

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak mengajukan usulan RP33BMN untuk tahun 2028.

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 30 Juni 2026 adalah sebanyak 833 unit dengan nilai sebesar Rp20.800.893.715,00. Namun, masih terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah	0	0	5	10.796.301.000	5	10.796.301.000
Alat Angkutan Bermotor	0	0	16	928.403.912	16	928.403.912
Peralatan dan Mesin Non TIK	0	0	667	1.950.918.694	667	1.950.918.694
Peralatan dan Mesin TIK	0	0	86	973.158,600	86	973,158,600
Alat Berat	0	0	2	306,280,000	2	306,280,000
Bangunan Gedung	0	0	2	8.960.227.748	2	8.960.227.748
Rumah Negara	0	0	17	2,995,700,000	17	2,995,700,000
Jalan dan Jembatan	-	-	0	0	0	0
Instalasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
Bangunan Air dan Irigasi	0	0	0	0	0	0
Aset Tetap lainnya	0	0	38	6,667,109	38	6,667,109
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	833	26.917.657.063	833	26.917.657.063

c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan permohonan terkait Penetapan Status Penggunaan (PSP), penjualan BMN berdasarkan data di SIMAN pada Menu Pengelolaan – Permohonan Pengelolaan) ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang.



2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang yang telah diterbitkan persetujuan/keputusannya.
4. Selesai Serah Terima
Selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar Rp21.420.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL26043009471611827	PSP	19.980.000
2	PPL26052015581452381	PSP	1.440.000

DATA PENDUKUNG

LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTASI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.01

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap

Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua

Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

Neraca

Neraca Percobaan Kas

Neraca Percobaan Akrua

Laporan Realisasi Belanja (LRA)

Laporan Realisasi Belanja (LRA) Belanja

Laporan Realisasi Belanja (LRA) Pendapatan

Laporan Operasional

Laporan Ekuitas

Laporan BMN

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)

Berita Acara Opname Fisik Persediaan

Berita Acara Rekon Internal

Laporan Pendukung Lainnya

Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Satker

Rincian Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2026

Rincian Nilai Kas di Bendahara Penerimaan Per 30 Juni 2026

Rincian Nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2026

Rincian Nilai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Per 30 Juni 2026

Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 01 Per 30 Juni 2026

Rekening Koran DIPA 01 Per 30 Juni 2026

Daftar Monitoring Penutupan Rekening Per 30 Juni 2026

Daftar Hibah Per 30 Juni 2026

Memo Koreksi Beban LO Per 30 Juni 2026

Daftar Aset Hasil Perolehan Hibah Tahun 2026

Daftar KDP sampai dengan 30 Juni 2026

Berita Acara Serah Terima TK/TM

Koreksi Pencatatan

Dakung Kartu KDP

Capaian Kinerja (Caput) Bulan Juni 2026



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG
KPPN PANGKAL PINANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 440728 - PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

Tgl Cetak : 28/07/26 4:40

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	23,799,398,000	23,799,398,000	0
2	Belanja	12,901,454,001	12,901,454,001	0
3	Pengembalian Belanja	-1,350,008	-1,350,008	0
4	Estimasi Pendapatan	32,821,000	32,821,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	16,793,670	16,793,670	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	48,000,000	48,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	48,000,000	48,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Juli 2026



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (440728) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 24/07/26 12:45 PM

Tgl Cetak : 24/07/26 1:34 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	48,000,000	0	48,000,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	1,590,795	(1,590,795)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	2,778,297	0	2,778,297	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	2,778,297	0	2,778,297	0.00
Persediaan	4,126,500	2,551,000	1,575,500	61.76
JUMLAH ASET LANCAR	54,904,797	4,141,795	50,763,002	1,225.63
ASET TETAP				
Tanah	10,796,301,000	10,796,301,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,120,947,206	4,100,967,206	19,980,000	0.49
Gedung dan Bangunan	11,955,927,748	11,955,927,748	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	6,667,109	6,667,109	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	610,458,285	0	610,458,285	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,334,642,876)	(5,068,448,086)	(266,194,790)	5.25
JUMLAH ASET TETAP	22,155,658,472	21,791,414,977	364,243,495	1.67
JUMLAH ASET	22,210,563,269	21,795,556,772	415,006,497	1.90
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,681,670,213	1,703,743,421	(22,073,208)	(1.30)
Utang Yang Belum Ditagihkan	47,846,641	0	47,846,641	0.00
Uang Muka dari KPPN	48,000,000	0	48,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,777,516,854	1,703,743,421	73,773,433	4.33
JUMLAH KEWAJIBAN	1,777,516,854	1,703,743,421	73,773,433	4.33
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	20,433,046,415	20,091,813,351	341,233,064	1.70
JUMLAH EKUITAS	20,433,046,415	20,091,813,351	341,233,064	1.70
JUMLAH EKUITAS	20,433,046,415	20,091,813,351	341,233,064	1.70
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22,210,563,269	21,795,556,772	415,006,497	1.90

Keterangan :

FINAL

PANGKALPINANG, 24 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



UJANG SOLIHIN

NIP.197011191997031003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (440728) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 24/07/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 24/07/26 1:34 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	12,900,103,993
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	16,793,670	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	16,793,670
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,208,248,300	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16,374	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	74,410,814	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17,397,528	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	53,640,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	73,040,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	20,829,555	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	44,972,820	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	104,287,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11,800,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	56,700,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	2,024,946,764	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	7,084,500,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	185,346,750	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,035	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,892,998	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,500,529	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8,480,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14,085,690	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	28,195,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	9,171,250	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	274,492,843	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	596,894	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	30,700,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25,754,700	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	46,027,689	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	799,200	0
3.0	522141	Belanja Sewa	335,455,875	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	900,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	160,702,080	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	121,999,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100,857,262	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	128,524,766	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (440728) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 24/07/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 24/07/26 1:34 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,980,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	610,458,285	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	8
3.1	511157	Pengembalian Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	0	1,350,000
JUMLAH			12,918,247,671	12,918,247,671

Keterangan :

FINAL

PANGKALPINANG, 24 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



UJANG SOLIHIN

197011191997031003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (440728) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 24/07/26 12:45 PM

Tgl Cetak : 24/07/26 1:34 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	48,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	2,778,297	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,947,000	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,179,500	0
0.0	131111	Tanah	10,796,301,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,120,947,206	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	11,955,927,748	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	6,667,109	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	610,458,285	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,830,737,220
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,503,905,656
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,681,670,213
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	47,846,641
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	48,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	12,900,103,993
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	16,793,670	0
0.0	391111	Ekuitas	0	20,091,813,351
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	19,571,967
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,386,026,100	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	18,717	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	86,300,984	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	19,707,296	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	60,345,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	82,170,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	21,499,219	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	51,273,360	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	104,287,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	13,275,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	70,200,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	1,936,742,050	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	6,891,500,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	210,228,150	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,601	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	16,878,838	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	5,093,945	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	9,540,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	15,968,610	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	28,195,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (440728) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 24/07/26 12:45 PM

Tgl Cetak : 24/07/26 1:34 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	10,436,250	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	276,714,106	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	642,996	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	30,700,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	3,315,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	42,512,960	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	666,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	336,022,542	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,200,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	161,037,080	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	121,999,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114,108,262	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	152,040,170	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,150,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	97,964,181	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	168,230,609	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	18,935,500	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	10,980,700	0
JUMLAH			40,123,649,041	40,123,649,041

Keterangan :

FINAL

PANGKALPINANG, 24 Juli 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 SEKRETARIS

 UJANG SOLIHIN
 NIP. 197011191997031003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG 440728

Tgl Data : 28/07/26 12:42 PM
Tgl Cetak : 28/07/26 4:27 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	32,821,000	16,793,670	(16,027,330)	51	30,419,000	16,646,406	13,772,594	55
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	32,821,000	16,793,670	(16,027,330)	51	30,419,000	16,646,406	13,772,594	55
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	32,821,000	16,793,670	(16,027,330)	51	30,419,000	16,646,406	13,772,594	55
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	23,799,398,000	12,900,103,993	(10,899,294,007)	54	16,813,531,000	6,595,911,829	10,217,619,171	39
1. Belanja Pegawai	20,604,951,000	11,038,115,399	(9,566,835,601)	54	8,681,394,000	5,388,759,856	3,292,634,144	62
2. Belanja Barang	2,174,447,000	1,231,550,309	(942,896,691)	57	1,921,952,000	895,813,675	1,026,138,325	47
3. Belanja Modal	1,020,000,000	630,438,285	(389,561,715)	62	6,210,185,000	311,338,298	5,898,846,702	5
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG 440728

Tgl Data : 28/07/26 12:42 PM
Tgl Cetak : 28/07/26 4:27 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	23,799,398,000	12,900,103,993	(10,899,294,007)	54	16,813,531,000	6,595,911,829	10,217,619,171	39
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

PANGKALPINANG, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



UJANG SOLIHIN

NIP.197011191997031003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 3000 **BANGKA BELITUNG**
SATUAN KERJA : 440728 **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/07/26 1:35 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 24/7/26 12:58 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,114,000,000	2,102,867,000	1,208,248,300	0	1,208,248,300	57.46	894,618,700
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26,000	26,000	16,374	8	16,366	62.95	9,634
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	135,400,000	37,700,000	74,410,814	0	74,410,814	197.38	(36,710,814)
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	35,000,000	9,810,000	17,397,528	0	17,397,528	177.34	(7,587,528)
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	93,870,000	26,870,000	53,640,000	0	53,640,000	199.63	(26,770,000)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	117,000,000	35,260,000	73,040,000	0	73,040,000	207.15	(37,780,000)
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	9,400,000	2,640,000	20,829,555	0	20,829,555	789	(18,189,555)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	82,000,000	21,470,000	44,972,820	0	44,972,820	209.47	(23,502,820)
511129	Belanja Uang Makan PNS	338,712,000	338,712,000	104,287,000	0	104,287,000	30.79	234,425,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	23,400,000	6,350,000	11,800,000	0	11,800,000	185.83	(5,450,000)
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	162,000,000	129,600,000	56,700,000	1,350,000	55,350,000	42.71	74,250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,110,808,000	2,711,305,000	1,665,342,391	1,350,008	1,663,992,383	61.37	1,047,312,617
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	1,302,482,000	3,815,540,000	2,024,946,764	0	2,024,946,764	53.07	1,790,593,236
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	5,397,000,000	13,546,800,000	7,084,500,000	0	7,084,500,000	52.3	6,462,300,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	6,699,482,000	17,362,340,000	9,109,446,764	0	9,109,446,764	52.47	8,252,893,236
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	350,000,000	350,000,000	185,346,750	0	185,346,750	52.96	164,653,250
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12,000	12,000	4,035	0	4,035	33.62	7,965
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	29,000,000	29,000,000	14,892,998	0	14,892,998	51.36	14,107,002
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	8,400,000	8,400,000	4,500,529	0	4,500,529	53.58	3,899,471
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14,840,000	14,840,000	8,480,000	0	8,480,000	57.14	6,360,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	26,600,000	26,600,000	14,085,690	0	14,085,690	52.95	12,514,310
511628	Belanja Uang Makan PPPK	84,744,000	84,744,000	28,195,000	0	28,195,000	33.27	56,549,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	15,180,000	17,710,000	9,171,250	0	9,171,250	51.79	8,538,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	528,776,000	531,306,000	264,676,252	0	264,676,252	49.82	266,629,748
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	10,339,066,000	20,604,951,000	11,039,465,407	1,350,008	11,038,115,399	53.57	9,566,835,601
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	623,024,000	659,917,000	274,492,843	0	274,492,843	41.6	385,424,157
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,000,000	6,000,000	596,894	0	596,894	9.95	5,403,106
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	73,680,000	73,680,000	30,700,000	0	30,700,000	41.67	42,980,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	17,191,000	10,770,000	0	0	0	0	10,770,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 3000 **BANGKA BELITUNG**
SATUAN KERJA : 440728 **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/07/26 1:35 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 24/7/26 12:58 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	719,895,000	750,367,000	305,789,737	0	305,789,737	40.75	444,577,263
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,800,000	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,100,000	1,740,000	1,740,000	0	1,740,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	42,192,000	42,180,000	25,754,700	0	25,754,700	61.06	16,425,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	42,192,000	42,180,000	25,754,700	0	25,754,700	61.06	16,425,300
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	76,284,000	104,328,000	46,027,689	0	46,027,689	44.12	58,300,311
522112	Belanja Langganan Telepon	4,800,000	4,800,000	799,200	0	799,200	16.65	4,000,800
522141	Belanja Sewa	338,000,000	377,500,000	335,455,875	0	335,455,875	88.86	42,044,125
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,200,000	1,200,000	900,000	0	900,000	75	300,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	420,284,000	487,828,000	383,182,764	0	383,182,764	78.55	104,645,236
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	172,994,000	189,367,000	160,702,080	0	160,702,080	84.86	28,664,920
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	164,430,000	156,600,000	121,999,000	0	121,999,000	77.9	34,601,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	217,135,000	293,631,000	100,857,262	0	100,857,262	34.35	192,773,738
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	554,559,000	639,598,000	383,558,342	0	383,558,342	59.97	256,039,658
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	240,584,000	240,584,000	128,524,766	0	128,524,766	53.42	112,059,234
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,150,000	12,150,000	3,000,000	0	3,000,000	24.69	9,150,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	252,734,000	252,734,000	131,524,766	0	131,524,766	52.04	121,209,234
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,991,764,000	2,174,447,000	1,231,550,309	0	1,231,550,309	56.64	942,896,691
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,000,000	20,000,000	19,980,000	0	19,980,000	99.9	20,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	20,000,000	20,000,000	19,980,000	0	19,980,000	99.9	20,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,000,000,000	1,000,000,000	610,458,285	0	610,458,285	61.05	389,541,715
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,000,000,000	1,000,000,000	610,458,285	0	610,458,285	61.05	389,541,715
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,020,000,000	1,020,000,000	630,438,285	0	630,438,285	61.81	389,561,715
	JUMLAH BELANJA	13,350,830,000	23,799,398,000	12,901,454,001	1,350,008	12,900,103,993	54.2	10,899,294,007

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 3000 BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : 440728 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 24/07/26 1:35 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	32,821,000	0	0	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	16,793,670	0	16,793,670	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	32,821,000	16,793,670	0	16,793,670	51.17
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	32,821,000	16,793,670	0	16,793,670	51.17
	JUMLAH PENDAPATAN	32,821,000	16,793,670	0	16,793,670	51.17

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (440728) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 24/07/26 12:45 PM
 Tgl Cetak : 24/07/26 1:32 PM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	19,571,967	19,420,737	151,230	0.779
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	19,571,967	19,420,737	151,230	0.779
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	19,571,967	19,420,737	151,230	0.779
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	11,019,690,120	6,048,855,809	4,970,834,311	82.178
Beban Persediaan	18,935,500	19,662,500	(727,000)	(3.697)
Beban Barang dan Jasa	693,513,604	690,687,158	2,826,446	0.409
Beban Pemeliharaan	408,125,042	162,570,811	245,554,231	151.044
Beban Perjalanan Dinas	155,190,170	56,937,836	98,252,334	172.561
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
 SATUAN KERJA : (440728) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 24/07/26 12:45 PM

Tgl Cetak : 24/07/26 1:32 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	266,194,790	180,990,050	85,204,740	47.077
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	12,561,649,226	7,159,704,164	5,401,945,062	75.449
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(12,542,077,259)	(7,140,283,427)	(5,401,793,832)	75.652
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	60	(60)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	60	(60)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	60	(60)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(12,542,077,259)	(7,140,283,367)	(5,401,793,892)	75.652
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(12,542,077,259)	(7,140,283,367)	(5,401,793,892)	75.652

Keterangan :
FINAL

PANGKALPINANG, 24 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS



UJANG SOLIHIN

NIP 197011191997031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (440728) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 24/07/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 24/07/26 1:33 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	20,091,813,351	15,999,961,116	4,091,852,235	25.57
SURPLUS/DEFISIT-LO	(12,542,077,259)	(7,140,283,367)	(5,401,793,892)	75.65
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	12,883,310,323	6,579,265,423	6,304,044,900	95.82
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	341,233,064	(561,017,944)	902,251,008	(160.82)
EKUITAS AKHIR	20,433,046,415	15,438,943,172	4,994,103,243	32.35

Keterangan :

FINAL

PANGKALPINANG, 24 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



UJANG SOLIHIN

NIP 197011191997031003



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;



- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pmutakhiran Data Barang Milik Negara;
- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul



Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.



LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2026, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.**

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu



Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:



1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, dalam LBKP Tahun 2026 Semester 1 ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah



Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2026 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 415/BUA.4/PL1.2.7/VII/2026. Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan



Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebesar Rp26.917.657.063,00 (*Dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp26,896,237,063,00 (*Dua puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2026 sebesar Rp21,420,000,00 (*Dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp21,420,000,00 (*Dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu*) dan mutasi kurang sebesar Rp0 (*Nol rupiah*.) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2026.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

(paragraf berikut ini hanya untuk narasi Laporan Barang Pengguna Wilayah/LBPW)

Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBPW) Bangka Belitung periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan himpunan dari LBKP pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Kuasa Pengguna Barang. (untuk LBP-W)

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 30 Juni 2026
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2026
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);



7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2026 menurut Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp26,896,237,063 (Dua puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp26,879,843,063 (*Dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp37,814,000,00 (*Tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp4.126.500,00 (*Empat juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus*



rupiah). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	1.052.000	1.895.000	2,947,000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1.499.000	319.500	1,179,500

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0 (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp0 (*nol rupiah*)

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp10.796.301.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 11,230 m² dengan nilai sebesar Rp10.796.301.000,00 (*Sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus satu ribu rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp6.089.258.000,00 (*Enam miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp6.089.258.000,00 (*Enam miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah



Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*) sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	11.230	10.796.301.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 4. Kondisi Tanah

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 771 buah dengan nilai sebesar Rp4,158,761,206,00 (*Empat miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 746 buah dengan nilai sebesar Rp4,137,341,206,00 (*Empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam*), mutasi tambah sebanyak 10 buah dengan nilai sebesar Rp160.430.190,00 (*Seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah.*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (*0 rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Bantu (3.01.03)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp306.280.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 341 buah dengan nilai sebesar Rp306.280.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
------------------------	----------------	-----------------



	(Rp)	(Rp)
-	-	-

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Besar

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Besar

Dari jumlah Alat besar di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Besar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2	306.280.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 7. Kondisi Alat Besar

b. Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 16 buah dengan nilai sebesar Rp928.403.912,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Alat Besar



Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Alat Besar

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Angkutan Darat Bermotor berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	16	928.403.912
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 10. Kondisi Alat Angkutan Darat Bermotor

Kelompok barang Alat Angkutan Darat Bermotor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

c. Alat Bengkel Bermesin (3.03.01)

Saldo Alat Bengkel Bermesin pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Bengkel Bermesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Alat Bengkel Bermesin



Mutasi Kurang Alat Bengkel Bermesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Alat Bengkel Bermesin

Dari jumlah Alat Bengkel Bermesin di atas, Saldo Alat Bengkel Bermesin yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Bengkel Bermesin berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 13. Kondisi Alat Bengkel Bermesin

Kelompok barang Alat Bengkel Bermesin yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

d. Alat Kantor(3.05.01)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp482.449.426,00 (*Empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp482.449.426,00 (*Empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-



Tabel 14. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor

Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 15. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor

Dari jumlah Alat Kantor di atas, Saldo Alat Kantor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Kantor berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	125	482.449.426
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 16. Kondisi Alat Kantor

Kelompok barang Alat Kantor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

e. Alat Rumah Tangga (3.05.02)

Saldo Alat Rumah Tangga pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.270.889.018 (*Satu miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.143.038.828 (*Satu miliar seratus empat puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp127.850.190 (*Seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	127.850.190	-



Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Alat Rumah Tangga

Dari jumlah Alat Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	500	1.270.889.018
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 19. Kondisi Alat Rumah Tangga

Kelompok barang Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

f. Alat Studio (3.06.01)

Saldo Alat Studio pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp130.561.000 (*Satu miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp130.561.000 (*Satu miliar seratus empat puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah.*), mutasi tambah sebesar Rp0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
------------------------	------------------------	-------------------------



-	-	-
---	---	---

Tabel 20. Rincian Mutasi Tambah Alat Studio

Mutasi Kurang Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 21. Rincian Mutasi Kurang Alat Studio

Dari jumlah Alat Studio di atas, Saldo Alat Studio yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Studio berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	14	130.561.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 22. Kondisi Alat Studio

Kelompok barang Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

g. Alat Komunikasi (3.06.02)

Saldo Alat Komunikasi pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp47.039.250 (*Empat puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp47.039.250 (*Empat puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-



Tabel 23. Rincian Mutasi Tambah Alat Komunikasi

Mutasi Kurang Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 24. Rincian Mutasi Kurang Alat Komunikasi

Dari jumlah Alat Komunikasi di atas, Saldo Alat Komunikasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Komunikasi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	20	47.039.250
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 25. Kondisi Alat Komunikasi

Kelompok barang Alat Komunikasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

h. Komputer Unit (3.10.01)

Saldo Alat Komputer Unit pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp702.730.668 (*Tujuh ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp683.100.668 (*Enam ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp19.630.000 (*Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Mutasi Tambah Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transaksi Masuk	19.630.000	-



Tabel 26. Rincian Mutasi Tambah Komputer Unit

Mutasi Kurang Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 27. Rincian Mutasi Kurang Komputer Unit

Dari jumlah Komputer Unit di atas, Saldo Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Komputer Unit berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	49	702.730.668
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 28. Kondisi Komputer Unit

Kelompok barang Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

i. Peralatan Komputer (3.10.02)

Saldo Peralatan Komputer pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp270.427.932 (*Dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp268.987.932 (*Dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 1.440.000 (*Satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transaksi Masuk	-	1.440.000



Tabel 29. Rincian Mutasi Tambah Komputer Unit

Mutasi Kurang Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 30. Rincian Mutasi Kurang Komputer Unit

Dari jumlah Komputer Unit di atas, Saldo Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Komputer Unit berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	37	270.427.932
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 31. Kondisi Komputer Unit

Kelompok barang Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp3.830.737.220,00 (*Tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp368.194.167,00 dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp4.934.000,00.

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2026



adalah sebesar Rp 11.955.927.748 (*Sebelas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 5.860.584.400,00 (*Lima miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah*), dan mutasi tambah sebesar Rp 8.921.850.486 (*Delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 2.826.507.138 (*Dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung Tempat Kerja (4.01.01)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp8.960.227.748,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp2.864.884.400,00, mutasi tambah sebanyak 5 buah dengan nilai sebesar Rp8.921.850.486,00 dan mutasi kurang sebanyak 5 buah dengan nilai sebesar Rp2.826.507.138,00.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	8.921.850.486,00	-

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Kerja

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	2.826.507.138,00	...

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Kerja

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Bangunan Gedung Tempat Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai



sebesar Rp0.

Rincian data Bangunan Gedung Tempat Kerja berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2	8.921.850.486,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 10. Kondisi Bangunan Gedung Tempat Kerja

b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal (4.01.02)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 17 buah dengan nilai sebesar Rp2.995.700.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 17 buah dengan nilai sebesar Rp2.995.700.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	...

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Tinggal di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Bangunan Gedung Tempat Tinggal yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai



sebesar Rp0.

Rincian data Bangunan Gedung Tempat Tinggal berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	17	2.995.700.000,00
Rusak Ringan	...	...
Rusak Berat	...	...

Tabel 10. Kondisi Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp11.955.927.748,00 (*Sebelas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp1.335.675.047,00 dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah Jalan dan Jembatan, 0 buah Irigasi, serta 0 buah Jaringan dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan adalah sebagai berikut:
Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
------------------------	----------------	-----------------



	(Rp)	(Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp0,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp6.667.109 (*Enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp6.667.109 (*Enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan Tercetak (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah



sebesar Rp. 2.967.109 (dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 2.967.109 (dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 13. Rincian Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 14. Rincian Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

b. Kartografi, Naskah dan Lukisan (6.01.03)

Saldo Kartografi, Naskah dan Lukisan pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Kartografi, Naskah dan Lukisan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-



Tabel 13. Rincian Mutasi Kartografi, Naskah dan Lukisan

Mutasi Kurang Kartografi, Naskah dan Lukisan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 14. Rincian Mutasi Kartografi, Naskah dan Lukisan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp6.667.109 (*Enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp0,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
------------------------	----------------	-----------------



	(Rp)	(Rp)
-	-	-

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

8. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per kelompok barang adalah sebagai berikut:

1) Software

Saldo Software pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya



Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	0	0
2. Peralatan dan Mesin	0	0
3. Gedung dan Bangunan	0	0
4. Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan	0	0
5. Aset Tetap Lainnya ..dst	0	0
Jumlah	0	0

Tabel 23. BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya per 30 Juni 2026

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun Aset Tetap Yang



Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 30 Juni 2026 yang sebelumnya senilai Rp0,00 (nol rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

d. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

9. Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit. atau Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah.

V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 30 Juni 2026

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp26,917,657,063,00 (*dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	4.126.500	0	0	0	4.126.500	0
	Sub Jumlah (1)	4.126.500	0	0	0	4.126.500	0



II	Aset Tetap						
1	Tanah	10.796.301.000	0	0	0	10.796.301.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4.100.967.206	0	36.374.000	0	4.158.761.206	0
3	Gedung dan Bangunan	11.955.927.748	0	0	0	11.955.927.748	0
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	6.667.109	0	0	0	6.667.109	0
6	KDP	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (2)		26,879,843,063	0	36.374.000	0	26,917,657,063	0
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (3)		0	0	0	0	0	0
Total		26,879,843,063	0	36.374.000	0	26,917,657,063	0

Tabel 26. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	-	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (1)		-	0	0	0	0	0
II	Aset Tetap						
1	Tanah	10.796.301.000	40	0	0	10.796.301.000	40
2	Peralatan dan Mesin	4.100.967.206	15	36.374.000	100	4.137.341.206	15
3	Gedung dan Bangunan	11.955.927.748	44,8	-	0	11.955.927.748	44,8
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0	-	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	6.667.109	0,2	0	0	6.667.109	0,2
6	KDP	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (2)		26.859.863.063	100	36.374.000	100	26.896.237.063	100
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	-	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0



3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (3)		0	0	0	0	0	0
Total		26.859.863.063	100	36.374.000	100	26.896.237.063	100

Tabel 26. Nilai Akumulasi Penyusunan BMN Per Akun Neraca

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No .	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar	4.126.500	4.126.500	0
1	Persediaan	4.126.500	4.126.500	0
II	Aset Tetap	21.791.414.977	21.791.414.977	0
1	Tanah	10.796.301.000	10.796.301.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4,120,947,206	4.100.967.206	0
3	Gedung dan Bangunan	11.955.927.748	11.955.927.748	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	6.667.109	6.667.109	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	610.458.285	610.458.285	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5,334,642,876)	(5,334,642,876)	0
III	Aset Lainnya	0	0	0
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain *)	0	0	0
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		22,159,784,972	22,159,784,972	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 27. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat



selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 3 (tiga) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan 2023	20.640.463.525	-	-
2	Laporan 2024	20.640.463.525	1.153.502.452	5,59%
3	Laporan 2025	21.793.965.977	1.153.502.452	5,59%

Tabel 27. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung per Periode Laporan

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	-	-	5	10.796.301.000
2	Alat Angkutan Bermotor	-	-	16	928.403.912
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	-	-	667	1.950.918.694
4	Peralatan dan Mesin TIK	-	-	86	973.158.600
5	Alat Berat	-	-	2	306.280.000
6	Bangunan Gedung	-	-	2	8.960.227.748
7	Rumah Negara	-	-	17	2.995.700.000
8	Jalan dan Jembatan	-	-	0	0
9	Instalasi dan Jaringan	-	-	0	0
10	Bangunan Air dan Irigasi	-	-	0	0



11	Aset Tetap lainnya	-	-	38	6.667.109
12	Aset Tak Berwujud	-	-	0	0
JUMLAH		-	-	833	26.917.657.063

Tabel 28. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung selama periode Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:



No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah- tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. dikembalikan	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 29. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026



c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 30. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0 (*nol rupiah*) sebagaimana rincian pada Daftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

2. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0 (*nol rupiah*) sebagaimana rincian pada Daftar Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Tidak ada permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026.

f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Tidak ada langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN Semester I tahun 2026. Terhadap aset berwujud yang dihentikan penggunaannya, perlu dilakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan aset tak berwujud tersebut betul-betul tidak digunakan dan segera diusulkan penghapusannya.



g. Pengungkapan Penting Lainnya

Tidak ada pengungkapan penting lainnya yang perlu disampaikan.

h. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak ada perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan.

C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung terkait **(Aset Tetap/Persediaan/dll)** dengan rincian temuan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Temuan BPK atas LKKL

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	-	-

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKKL 2025 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

2. Temuan BPK atas LKPP

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	-	-

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKPP 2025 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2026.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2026 Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2028 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telaah
1	Pemeliharaan	Bangunan gedung kantor	Pengajuan
2	Pemeliharaan	Bangunan rumah negara	Pengajuan
3	Pemeliharaan	Kendaraan dinas roda 4	Pengajuan
4	Pemeliharaan	Kendaraan dinas roda 2	Pengajuan
5	Pemeliharaan	Peralatan dan mesin TIK dan Non TIK	Pengajuan



Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 0 usulan dan tidak disetujui sebanyak 0 usulan

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak mengajukan usulan RP33BMN untuk tahun 2028.

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 30 Juni 2026 adalah sebanyak 833 unit dengan nilai sebesar Rp20.800.893.715,00. Namun, masih terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah	0	0	5	10.796.301.000	5	10.796.301.000
Alat Angkutan Bermotor	0	0	16	928.403.912	16	928.403.912
Peralatan dan Mesin Non TIK	0	0	667	1.950.918.694	667	1.950.918.694
Peralatan dan Mesin TIK	0	0	86	973.158,600	86	973,158,600
Alat Berat	0	0	2	306,280,000	2	306,280,000
Bangunan Gedung	0	0	2	8.960.227.748	2	8.960.227.748
Rumah Negara	0	0	17	2,995,700,000	17	2,995,700,000
Jalan dan Jembatan	-	-	0	0	0	0
Instalasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
Bangunan Air dan Irigasi	0	0	0	0	0	0
Aset Tetap lainnya	0	0	38	6,667,109	38	6,667,109
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	833	26.917.657.063	833	26.917.657.063

c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan permohonan terkait Penetapan Status Penggunaan (PSP), penjualan BMN berdasarkan data di SIMAN pada Menu Pengelolaan – Permohonan Pengelolaan) ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang.



2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang yang telah diterbitkan persetujuan/keputusannya.
4. Selesai Serah Terima
Selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar Rp21.420.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL26043009471611827	PSP	19.980.000
2	PPL26052015581452381	PSP	1.440.000



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jln Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Pangkalpinang
Telp. (0717) 431929 Fax (0717) 421639, www.pta-babel.go.id, ptababel@gmail.com

HASIL OPNAME FISIK

Nomor : 112/KPB.PTA.W28-A/PL1.2.5/VI/2026

Nama Satker : PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Satker : 440728
UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI

No	Nama Barang	Kode Barang	Kuantitas Barang		Selisih*)	Kondisi		
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang	Rusak
ALAT TULIS								
1	Pena Snowman	000101	3	3		Baik		
2	Spidol Boardmaker	000203	2	2		Baik		
3	Stabillo	000301	1	1		Baik		
4	Pena Joyko	000420	1	1		Baik		
5	Stabillo Kecil	000421	1	1		Baik		
6	Rautan Pensil	000422	1	1		Baik		
7	Pena Boldliner Standard Biru	000446	1	1		Baik		
PENJEPIT KERTAS								
8	Binder Clips	000201	2	2		Baik		
9	Pelobang Kertas	000301	1	1		Baik		
10	Trigonal Clip No 3	000303	1	1		Baik		
11	Binder Clip 107	000305	6	6		Baik		
12	Binder Clip 155	000306	2	2		Baik		
13	Binder Clip 260	000307	2	2		Baik		
14	Push Pins	000308	1	1		Baik		
PENGHAPUS/KOREKTOR								
15	Penghapus Pensil	000101	6	6		Baik		
16	Tipe X Joyko	000201	4	4		Baik		
17	Tip-X Kertas	000207	1	1		Baik		
BUKU TULIS								
18	Buku Tulis Quarto	000102	1	1		Baik		
19	Buku Folio	000104	6	6		Baik		

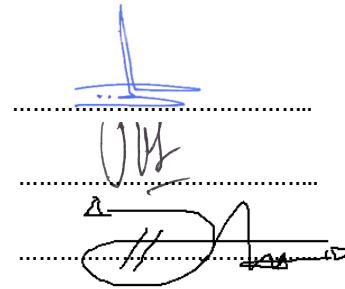
ORDNER DAN MAP								
20	Map Folio	000201	1	1		Baik		
21	Business File	000210	1	1		Baik		
22	Map Resliting	000217	1	1		Baik		
23	Map Biola2	000218	1	1		Baik		
PENGGARIS								
24	Penggaris Besi 30 cm	000201	2	2		Baik		
CUTTER (ALAT TULIS KANTOR)								
25	Cutter Combo	000105	5	5		Baik		
ALAT PEREKAT								
26	Isolasi Bening Kecil	000401	2	2		Baik		
27	Double Tape Busa	000407	2	2		Baik		
28	Lem Glue Stick 40gr	000410	3	3		Baik		
29	Double Tape1"	000411	3	3		Baik		
30	Isolasi Kecil1	000413	1	1		Baik		
31	Lakban Bening ½	000414	3	3		Baik		
STADLER HD								
32	Stapler HD 10	000101	4	4		Baik		
33	Stapler HD 50	000201	1	1		Baik		
34	Isi Staples no 10 (new)	000503	1	1		Baik		
ISI STAPLES								
35	Isi Staples No.10	000001	4	4		Baik		
ALAT TULIS KANTOR LAINNYA								
36	Gunting	000102	6	6		Baik		
37	Transparent Flag TJ44.8	000107	2	2		Baik		
38	Clip Board Acrilic	000115	2	2		Baik		
39	Post IT	000118	1	1		Baik		
40	Gunting Besar	000117	1	1		Baik		
41	Gunting Sedangg	000118	1	1		Baik		
42	Label Undangan No 121	000120	2	2		Baik		
43	Label	000122	1	1		Baik		
KERTAS HVS								
44	Kertas A4	000311	1	1		Baik		
45	Kertas F4	000301	1	1		Baik		
46	Kertas F4 70 gr	000303	1	1		Baik		
47	Kertas A4 80 Sidu	000307	1	1		Baik		
48	Kertas HVS A4 75gr	000310	1	1		Baik		
BERBAGAI KERTAS								
49	Tissu Jolly 560 Gr	000109	4	4		Baik		
50	TIssu Jolly 560 Gr	000110	2	2		Baik		
KERTAS COVER								

51	Kertas Kado Besar	000107	1	1		Baik		
AMPLOP								
52	Amplop Putih Kecil	000201	1	1		Baik		
53	Amplop Putih Besar	000202	1	1		Baik		
KERTAS DAN COVER LAINNYA								
54	Stiker Glossy	000113	1	1		Baik		
BAHAN KOMPUTER LAINNYA								
55	Mousepad	000003				Baik		
TINTA CETAK								
56	Tinta Blueprint Canon B, C, M, Y	000017	1	1		Baik		
SAPU DAN SIKAT								
57	Sikat WC	000002	1	1		Baik		
58	Kit Ban	000006	1	1		Baik		
59	Kuas Ban	000008	2	2		Baik		
ALAT-ALAT PEL DAN LAP								
60	Busa Cuci Piring	000007	1	1		Baik		
61	Kanebo	000010	3	3		Baik		
62	Kanebo2	000026	3	3		Baik		
KESET DAN TEMPAT SAMPAH								
63	Tempat Sampah Uk. 15 L	000015	2	2		Baik		
64	Plastik Sampah	000016	1	1		Baik		
KUNCI, KRAN DAN SEMPROTAN								
65	Kran Air	000002	1	1		Baik		
BAHAN KIMIA UNTUK PEMBERSIH								
66	Herbatop	000001	1	1		Baik		
67	Sunlight	000005	1	1		Baik		
68	Wipol	000007	1	1		Baik		
69	Cling	000009	13	13		Baik		
70	Sunlight Lime	000012	9	9		Baik		
71	Nuvo sabun cair	000016	4	4		Baik		
72	Handsoap Botol Pump	000023	1	1		Baik		
73	Wipol Lemon	000027	8	8		Baik		
74	Shampo Mobil	000036	1	1		Baik		
75	Kit Ban2	000039	1	1		Baik		
76	Sunlight2	000042	1	1		Baik		
77	Kit Ban Refill	000046	1	1		Baik		
ALAT UNTUK MAKAN DAN MINUM								
78	sendok	000025	1	1		Baik		
PENGHARUM RUANGAN								
79	Stella Gantung	000104	10	10		Baik		
80	Refill Glade	000111	2	2		Baik		

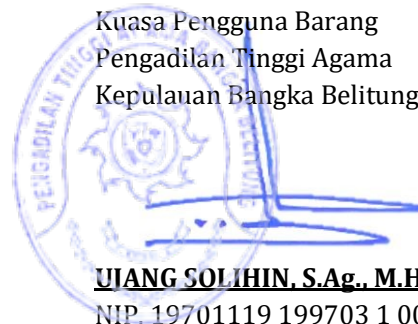
KUAS								
81	Kuas Ban2	000001	2	2		Baik		

Tim Pelaksana Opname Fisik :

1. Ujang Solihin, S.Ag., M.H., M.M.
2. Ian Herkartadi, S.Kom.
3. Ramadhana Kurnia Putra Wijayanto, S.T.



Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Barang
 Pengadilan Tinggi Agama
 Kepulauan Bangka Belitung,



UJANG SOLIHIN, S.Ag., M.H., M.M.
 NIP. 19701119 199703 1 003

*) Jika terdapat selisih antara Hasil Opname Fisik Atas Persediaan dengan Buku/Aplikasi Persediaan maka ditelusuri perbedaannya dan jelaskan sebab perbedaannya. Penjelasan selisih menjadi formulir Opname Fisik ini.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jln Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Pangkalpinang
Telp. (0717) 431929 Fax (0717) 421639, www.pta-babel.go.id, ptababel@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN

Nama Satker : PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Satker : 440728
UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-06-2026) bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertandatangan di bawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan :

1. Nama : Ujang Solihin, S.Ag., M.H., M.M. (Sekretaris)
NIP : 19701119 199703 1 003
Jabatan : Ketua
2. Nama : Ian Herkartadi, S.Kom (Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga)
NIP : 19850525 200904 1 001
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Ramadhana Kurnia Putra Wijayanto, S.T. (Penata Layanan Operasional)
NIP : 19960205 202506 1 009
Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa telah melakukan Opname Fisik Persediaan Semester I Tahun 2026 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (*Opname Fisik*)

1. Ujang Solihin, S.Ag., M.H., M.M.
2. Ian Herkartadi, S.Kom
3. Ramadhana Kurnia Putra Wijayanto, S.T.

.....
.....
.....

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tinggi Agama
Kepulauan Bangka Belitung,



UJANG SOLIHIN, S.Ag., M.H., M.M.
NIP. 19701119 199703 1 003



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jln Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Pangkalpinang
Telp. (0717) 431929 Fax (0717) 421639, www.pta-babel.go.id, ptabel@gmail.com

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Periode Semester I Tahun Anggaran 2026
NOMOR: 110/KPB.PTA.W28-A/PL1.2.5/VI/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-07-2026), bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung alamat Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel. Air Itam Pangkalpinang, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : RAMADHANA KURNIA PUTRA WIJAYANTO, S.T.
NIP : 19960205 202506 1 009
Jabatan : Operator Aset dan Persediaan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : NIFA NOVALIN, S.S.T.
NIP : 19931102 202203 2 008
Jabatan : Operator GLP
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna (LBP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/ Barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) untuk periode Semester I - Tahun Anggaran 2026, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

NO	AKUN NERACA	Nilai BMN Periode Semester I Tahun Anggaran 2026		
		SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
I	POSISI BMN DI NERACA	21,564,145,187	(14,818,500)	22,159,784,972
A.	ASET LANCAR	2,551,000	1,575,500	4,126,500
1	Persediaan	2,551,000	1,575,500	4,126,500
B.	ASET TETAP	21,561,594,187	(16,394,000)	22,155,658,472
1	Tanah	10,796,301,000	-	10,796,301,000
2	Peralatan dan Mesin	4,137,341,206	(16,394,000)	4,120,947,206
3	Gedung dan Bangunan	11,955,927,748	-	11,955,927,748
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap dalam Renovasi	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	6,667,109	-	6,667,109
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	610,458,285
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5,334,642,876)	-	(5,334,642,876)
C.	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-
3	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
II	BMN NON NERACA	36,374,000	-	37,814,000
1	Ekstrakomptabel	36,374,000	1,440,000	37,814,000
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	-	-	-
III	TOTAL GABUNGAN (I+II)	21,600,519,187	14,818,500	22,197,598,972

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Semester I Tahun Anggaran 2026 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Aset dan Persediaan

RAMADHANA KURNIA PUTRA WIJAYANTO, S.T.
NIP : 19960205 202506 1 009

Operator GLP

NIFA NOVALIN, S.S.T.
NIP : 19931102 202203 2 008

Mengetahui,
Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama
Kepulauan Bangka Belitung

UJANG SOLIHIN, S.Ag., M.H., M.M.
NIP. 197011191997031003

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTERAN/TRIWULANAN/TAHUNAN I TA 2026

Kode dan Nama UAKPA : (440728) Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
 Kode dan Nama UAPPAW : (3000) Bangka Belitung
 Kode dan Nama Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2. Face LRA, Neraca, LO, dan LPE	✓		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Laporan Keuangan Tambahan			
1. Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓		Ada
2. Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
3. Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/ MonSAKTI			
Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/ MonSAKTI	✓		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/ MonSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3. Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECEKAN PADA MonSAKTI			
To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan		✓	Tidak
2. Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓		Ya

3. Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
---	--	---	-------

4. Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5. Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6. Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7. Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8. Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10. Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11. Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12. Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak

Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah

Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah "TDK RUPIAH" Yang BEDA?		√	Tidak
2. Adakah "TDK COA" Yang BEDA?		√	Tidak
3. Adakah "TDK DETAIL" Yang BEDA?		√	Tidak
i. Pagu/DIPA		√	Tidak
ii. Estimasi PNB		√	Tidak
iii. Belanja		√	Tidak
iv. Pengembalian Belanja		√	Tidak
v. Pendapatan		√	Tidak
vi. Pengembalian Pendapatan		√	Tidak
vii. Kas BLU		√	Tidak
viii. Kas Di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
ix. Kas Hibah		√	Tidak
x. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
Daftar MonSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2. Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		√	Ada/Tidak
3. Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4. Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5. Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6. Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			

Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak

2. Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3. Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak

Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
--	-----------	--------------	-------------------

1. Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2. Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	N/A	N/A	Ya
3. Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	N/A	N/A	Ya
4. Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5. Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	N/A	N/A	Ya
6. Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	N/A	N/A	Ya
7. Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		√	Tidak

Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
---------------------------------------	-----------	--------------	-------------------

1. Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2. Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3. Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4. Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5. Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6. Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7. Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8. Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9. Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN	√		Ya
10. Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11. Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12. Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13. Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak

Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
------------------------------	------------	--------------	-------------------

1. Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2. Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak

3. Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4. Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	N/A	N/A	Ada/Tidak
Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah	N/A	N/A	
2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	N/A	N/A	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2. Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1. Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.	N/A	N/A	Ada/Tidak
2. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)	N/A	N/A	Ada/Tidak
3. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A	N/A	Ya
4. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A	N/A	Ya
5. Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)?	N/A	N/A	Ya
Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1. Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A	N/A	Ya
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MonSAKTI			0
2. Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			0
3. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	N/A	N/A	Ya/Tidak
2. Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	N/A	N/A	Ya/Tidak

3. Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?	N/A	N/A	Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	N/A	N/A	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	N/A	N/A	Ya/Tidak
Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk	N/A	N/A	
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah.		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA			
Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Saldo Awal 1 Jan 2026 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2. Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4. Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5. Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6. Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7. Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	N/A	N/A	Ya
8. Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2. Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3. Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4. Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5. Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/ penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6. Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7. Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1. "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2. Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3. Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		√	Tidak

apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP			
4. Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	N/A	N/A	Ya
Contoh: Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	N/A	N/A	Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)			
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2. Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3. Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4. Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5. Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6. Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	N/A	N/A	Ya/Tidak
7. Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	N/A	N/A	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ya/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ya/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ya/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)		√	Ya/Tidak
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ya/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)		√	Ya/Tidak
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		√	Ya/Tidak
5. Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		√	Ya/Tidak
Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		√	Ya

Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
2. Apakah ada Beban Bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Manual AkruaI pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan AkruaI		√	Ya/Tidak
2. Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan AkruaI		√	Ya/Tidak
3. Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan AkruaI		√	Ya/Tidak
4. Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		√	Ya/Tidak
- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan AkruaI		√	Ya/Tidak
5. Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan AkruaI		√	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU			
LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	N/A	N/A	Ya
2. Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	N/A	N/A	Tidak
3. Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A	N/A	Ya
4. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?	N/A	N/A	Ya
5. Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A	N/A	Ya
6. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU?	N/A	N/A	Ya
LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?	N/A	N/A	Ya
2. Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A	N/A	Ya
3. Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A	N/A	Ya
4. Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya
5. Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
6. Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
7. Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN			

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MonSAKTI "

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Penelaah,



YULIA

RINCIAN NILAI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 30 Juni 2026

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
 SATUAN KERJA : 440728 PENGADILAN TINGGI AGAMA KEP. BANGKA I

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 Juni 2026				Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	Bangka Belitung	440728	Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung	Rp 48,000,000	Rp -	-	Rp 48,000,000	Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp. 48.000.000
					Rp -	Rp -	-	Rp -	Kuitansi UP
					Rp -	Rp -	-	Rp -	Selisih karena Kesulitan Mencari pecahan
JUMLAH					Rp -	Rp -	-	Rp -	Jumlah UP


Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Sekretaris

Ujang Solihin

**RINCIAN SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 30 Juni 2026**

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 Juni 2026				Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	BANGKA BELITUNG	440728	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEP. BANGKA BELITUNG	Rp -	Rp -	-	Rp -	
JUMLAH					-	-	-		

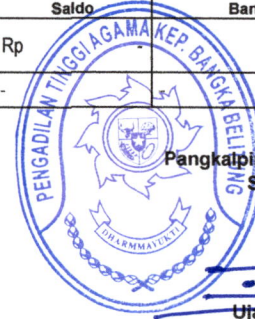
Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Sekretaris

Ujang Solihin

RINCIAN NILAI KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 30 Juni 2026

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG

NO	KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 Juni 2026				Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	BANGKA BELITUNG	440728	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEP. BANGKA BELITUNG	Rp -	Rp -	-	Rp -	
JUMLAH					-	-	-	-	



Pangkalpinang, 30 Juni 2026
 Sekretaris

Ujang Solihin

**RINCIAN NILAI KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 30 Juni 2026**

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : BANGKA BELITUNG

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 Juni 2026				Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	BANGKA BELITUNG	440728	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEP. BANGKA BELITUNG	Rp -	Rp -	-	Rp -	
JUMLAH					-	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEP. BANGKA BELITUNG	-	-	-

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
 Sekretaris

 Ujang Sotihin

**DATA REKENING BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA DIPA 01
PENGADILAN TINGGI AGMAA KEP. BANGKA BELITUNG**

NO	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA	K/L	BA- ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
1	440728	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEP. BANGKA BELITUNG	005	01	VA	653244407281000	BPG 015. PENGADILAN TINGGI AGAMA BABEL-01	Bank Rakyat Indonesia	Rp -

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Sekretaris

Ujang Solihin

DAFTAR MONITORING PENUTUPAN REKENING
PERIODE 30 Juni 2026

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	TANGGAL PENUTUPAN	ALASAN PENUTUPAN
1	440728	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEP. BANGKA BELITUNG	005	01	-	-	-	-	-	-



Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Sekretaris

Ujang Solihin

DAFTAR ASET HASIL PEROLEHAN HIBAH TAHUN 2026

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
 SATKER : 440728 PENGADILAN TINGGI AGAMA KEP. BANGKA BELITUNG

NO	SATUAN KERJA	NAMA SATKER	BENTUK HIBAH	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BARANG	KET
NIHIL							



Pangkalpinang, 30 Juni 2026
 Kuasa Pengguna Barang

Ujang Solihin

SATKER : 440728 PENGADILAN TINGGI AGAMA KEP. BANGKA BELITUNG
WILAYAH BANGKA BELITUNG

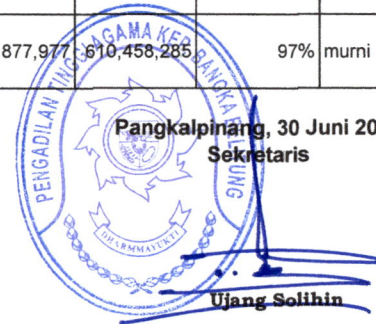
RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 Juni 2026

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	No. KDP	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp) Murni/Pinjaman	Uang Muka	Retensi	Keterangan		
													Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen
1	440728	Pengadilan Tinggi Agama Kep. Bangka Belitung	7010101003	6	20/05/2026	114/PPK.PTA.W28-A/PL1.1.7/V/2026	792,877,977	610,458,285	97%	murni					

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Sekretaris



Ujang Solihin

RENCANA TINDAK LANJUT
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG TAHUN 2026

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			RENCANA TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
		I	II	III		
N IHL						

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Sekretaris



MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEP. BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA	TAHUN ANGGARAN	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	3000	440728	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEP. BANGKA BELITUNG	2026	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Sekretaris

Ujang Solihin

